



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ISHAR MASIALA**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**
3. NHK : **793839**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.495.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/50 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/55 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Bangunan Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 5 m2/20 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/80 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 648 m2/10 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 683 m2/300 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 185.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA 10 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 105.000.000

2. MOBIL, TOYOTA AVANZA NEW AVANZA 1.5G M/T Tahun 2012,

HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 230.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 55.389.100

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.966.189.100

III. HUTANG

Rp. 110.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.856.189.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.